

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tingkat konsumsi rumah tangga merupakan salah satu komponen dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Perkembangan dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga selalu menjadi kontributor terbesar dalam pembentukan nilai PDB. Pengeluaran konsumsi rumah tangga digunakan untuk memenuhi berbagai pengeluaran konsumsi akhir atas barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan individu ataupun kelompok. Pengeluaran rumah tangga di sini mencakup pembelian untuk makanan dan bukan makanan di dalam negeri maupun di luar negeri. Perilaku rumah tangga dalam mengonsumsi makanan dan bukan makanan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari merupakan salah satu hal yang dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara (Wahyuni, Purnastuti, & Mustofa, 2016).

Berdasarkan data pengeluaran untuk konsumsi penduduk Indonesia yang dipublikasikan oleh BPS (2020^a) memperlihatkan bahwa secara rata-rata telah terjadi penurunan dalam pendapatan rumah tangga di Indonesia, sehingga masyarakat perlu mengatur kembali pola konsumsinya untuk mencukupi kebutuhan dasar mereka. Perbedaan tingkat pendapatan penduduk di daerah perkotaan dan di daerah perdesaan menimbulkan tanggapan yang berbeda dalam menangani upaya pemenuhan kebutuhan konsumsinya.

Pada umumnya, bila selera tidak berbeda maka pengeluaran pangan rumah tangga akan meningkat sejalan dengan meningkatnya pendapatan, akan tetapi proporsi pengeluaran pangan tersebut dari total pendapatan akan menurun. Fenomena tersebut dikenal dengan Hukum Engel (Mankiw, 2007 *dalam* Mayasari, Satria, & Noor, 2018). Tingkat pendapatan juga memengaruhi pola konsumsi pangan. Hal ini sesuai dengan Hukum Bennet yang menyatakan ketika orang menjadi lebih kaya, mereka cenderung beralih dari pola makan sederhana yang didominasi bahan pangan berpati ke input makanan yang lebih bervariasi yang mencakup berbagai sayuran, buah, produk susu, dan terutama daging - yang mana merupakan jenis makanan yang dikonsumsi oleh orang kaya (Godfray, 2011).

Tingkat pendapatan keluarga menggambarkan daya beli masyarakat untuk dapat memenuhi kecukupan konsumsi gizi minimal hariannya supaya hidup sehat. Penelitian Illahi (2017) menunjukkan bahwa balita usia 24-59 bulan di Desa Ujung Piring Bangkalan yang menderita stunting yang mana merupakan salah satu wujud kekurangan gizi sebagian besar memiliki pendapatan keluarga di bawah upah minimum. Hal ini sejalan dengan penelitian Tanzil dan Hafriani (2021) yang menyebutkan pendapatan keluarga yang rendah merupakan salah satu faktor risiko terjadinya stunting pada balita usia 24-59 bulan di wilayah kerja UPTD Puskesmas Simpang Ulim, Aceh Timur selain faktor dari kurangnya asupan energi dan protein, serta pengetahuan dan pendidikan ibu yang rendah.

Secara global, Indonesia masih termasuk ke dalam 50 negara dengan jumlah penderita kekurangan gizi terbesar berdasarkan publikasi *The State of Food Security and Nutrition in the World 2020* yang disusun oleh FAO bersama IFAD, UNICEF, WFP dan WHO dengan menggunakan data tahun 2018. Untuk mencukupi kebutuhan gizi tersebut, maka konsumsi pangan perlu dipenuhi dari seluruh kelompok pangan, termasuk kelompok pangan hewani.

Kebutuhan akan pangan hewani bisa terpenuhi baik dari jenis ternak maupun ikan. Kendati demikian, penelitian Suryawati, Saptanto, Ariani, & Koeshendrajana (2005^a) menunjukkan bahwa ikan sangat berperan dalam menyumbang protein hewani di dalam mutu gizi makanan rumah tangga Indonesia pada masa pemulihan dari krisis moneter tahun 1997-1998. Penelitian Suryawati, Saptanto, & Koeshendrajana (2005^b) juga memperlihatkan bahwa masyarakat berpendapatan rendah cenderung memberikan prioritas pada komoditas ikan dalam pemenuhan pangan hewani dimana pada masa tersebut daya beli penduduk Indonesia terguncang akibat krisis moneter. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Virgantari, Daryanto, Harianto, & Kuntjoro (2011) yang memperlihatkan bahwa secara umum masyarakat dengan keterbatasan anggaran, lebih memberikan prioritas alokasi anggaran untuk produk perikanan dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan hewannya pada tahun 2002-2008.

Sebagai negara maritim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi perairan yang sangat besar dan beragam. Luas perairan Indonesia adalah 6,4 juta

km² yang terdiri dari luas perairan pedalaman dan perairan kepulauan 3,11 juta km², luas laut teritorial 0,29 juta km², dan luas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia 3 juta km². Selain itu Indonesia memiliki luas Zona Tambahan perairan 0,27 juta km², luas landas kontinen 2,8 juta km², dan memiliki panjang garis pantai 108.000 km yang merupakan garis pantai terpanjang kedua di dunia (Pushidrosal, 2018; KKP, 2020^a). Dari seluruh potensi sumber daya ikan tersebut, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (JTB) sebesar 10,03 juta ton per tahun (sekitar 80% dari potensi lestari 12,54 juta ton per tahun), dan baru dimanfaatkan sebesar 6,98 juta ton pada tahun 2019 (69,59% dari JTB), sementara total produksi perikanan tangkap (di laut dan perairan darat) adalah 7,53 juta ton (KKP, 2020^a). Indonesia merupakan salah satu dari tiga negara produsen perikanan tangkap terbesar di dunia dengan menyumbang sebesar 7% dari total tangkapan global pada tahun 2018 (FAO, 2020).

Indonesia juga mempunyai potensi lahan perikanan budidaya yang sangat luas yaitu 17,91 juta ha yang meliputi lahan budidaya air tawar 2,8 juta ha (15,8%), lahan budidaya air payau 2,96 juta ha (16,5%) dan lahan budidaya laut 12,12 juta ha (67,7%). Pemanfaatan potensi lahan perikanan baru mencapai 2,7% yang terdiri atas pemanfaatan lahan budidaya laut 278.920 ha, pemanfaatan lahan budidaya tambak 605.909 ha, dan pemanfaatan lahan budidaya air tawar 316.446 ha. Potensi produksi perikanan budidaya di Indonesia mencapai 100 juta ton/tahun dengan nilai produksi mencapai USD 251 miliar (Dahuri *dalam* KKP, 2020^a).

Potensi sumber daya ikan yang sangat besar tersebut tidak serta merta membuat konsumsi ikan rumah tangga Indonesia juga tinggi. Indonesia masih tertinggal cukup jauh dari negara-negara dimana preferensi konsumsi untuk ikan telah berkembang dan bertahan sejak lama seperti Islandia, Jepang, Norwegia, dan Republik Korea dengan total konsumsi lebih dari 100 kalori per hari pada tahun 2017 (FAO, 2020).

Pola konsumsi penduduk bersifat dinamis, dan karakteristik lingkungan serta wilayah tempat dimana mereka tinggal seperti apakah tinggal di perkotaan atau di perdesaan turut memengaruhi pola makanan yang dikonsumsi (BPS, 2020^a). Oleh karena itu, diperlukan kajian terbaru mengenai pola pemenuhan

kebutuhan konsumsi terutama pangan hewani dimana jenis ikan merupakan titik fokus kajiannya dikarenakan pada kasus-kasus sebelumnya ikan berkontribusi cukup nyata dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan hewani bagi masyarakat terutama pada masa krisis saat daya beli masyarakat terguncang.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dan data-data yang telah dijabarkan, maka dapat dirumuskan masalah untuk dikaji lebih lanjut, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pola konsumsi pangan hewani penduduk Indonesia menurut wilayah perkotaan dan perdesaan?
2. Bagaimana tingkat keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan hewani di Indonesia menurut wilayah perkotaan dan perdesaan?
3. Bagaimana peranan ikan dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan hewani di Indonesia menurut wilayah perkotaan dan perdesaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi pola konsumsi pangan hewani penduduk Indonesia menurut wilayah perkotaan dan perdesaan.
2. Menganalisis tingkat keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan hewani di Indonesia menurut wilayah perkotaan dan perdesaan.
3. Mengidentifikasi dan menelusuri peranan ikan dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan hewani di Indonesia menurut wilayah perkotaan dan perdesaan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Peneliti, sebagai bahan informasi yang memberikan gambaran mengenai pola pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan hewani di Indonesia dan peranan ikan di dalamnya;

2. Lembaga Universitas, sebagai bahan informasi dan masukan untuk menunjang aktivitas dalam melaksanakan perannya;
3. Pemerintah, sebagai bahan pertimbangan dalam proses perencanaan kebijakan terkait pangan ikan dan pangan hewani di Indonesia;
4. Pelaku agribisnis di bidang perikanan, sebagai sumber referensi dan menjadi bahan pertimbangan dalam proses perencanaan usahanya.